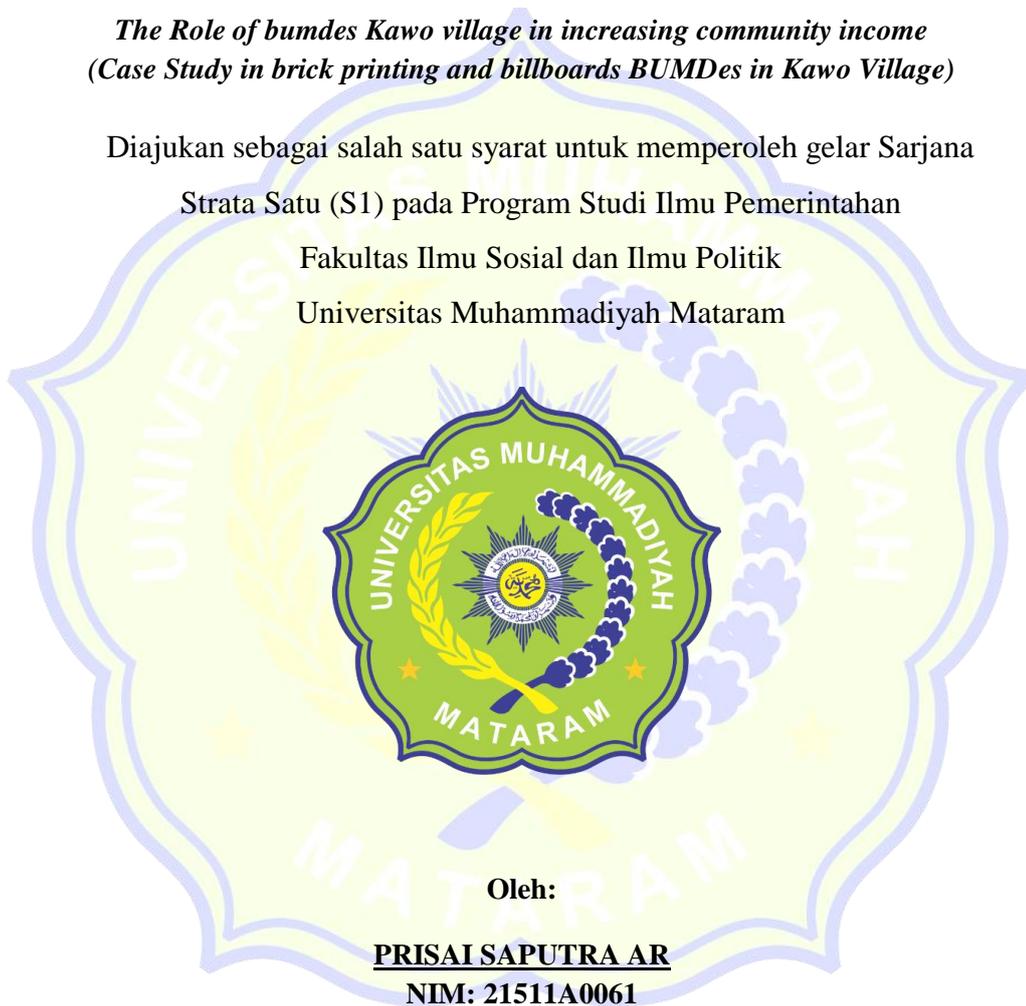


# SKRIPSI

**PERAN BUMDes DESA KAWO DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus Pada Percetakan Batako Dan Baliho BUMDes  
Desa Kawo Kecamatan Pujut Lombok Tengah)**

*The Role of bumdes Kawo village in increasing community income  
(Case Study in brick printing and billboards BUMDes in Kawo Village)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

**PRISAI SAPUTRA AR**

**NIM: 21511A0061**

**JURUSAN URUSAN PUBLIK**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panitia Ujian Skripsi  
Program Studi Administrasi Publik pada :

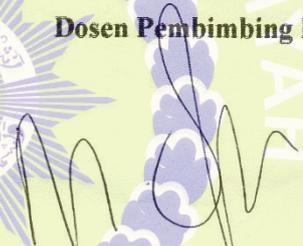
Hari : Selasa  
Tanggal : 4 Februari 2020

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
(Dr. H. Ibrahim H. Abdullah, MM)  
NIDN. 08301225501

  
(M. Ulfatul Akbar Jafar, S. AP., M.IP)  
NIDN. 0809039203

Mengetahui,

Program Studi Administasi Publik

Ketua



  
(RAHMAD HIDAYAT, S.AP., M.AP)  
NIDN. 0822048901

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT  
(STUDI PADA PERCEAKAN BATAKO DAN BALIHO BUMDes DESA  
KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

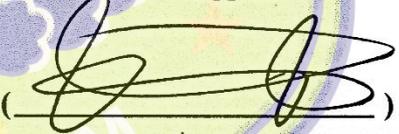
Oleh :

**PRISAI SAPUTRA AR**  
NIM. 21511A0061

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada  
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji  
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.  
Mataram, 04 Februari 2020**

Tim Penguji

1. **Dr. H. Ibrahim H abdullah MM** (  )  
NIDN. 0830215501  
Ketua
2. **M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP, M.IP** (  )  
NIDN. 0809039203  
Anggota
3. **Drs. Ramayanto, MM** (  )  
NIDN. 0809096702  
Anggota

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



( **Dr. H. Muhamad Ali, M.Si** )

NIDN. 0806066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRISAI SAPUTRA AR .....  
NIM : 21511A0061 .....  
Tempat/Tgl Lahir : kawo 01-12-1996 .....  
Program Studi : Adm Publik .....  
Fakultas : PSIPOL .....  
No. Hp/Email : 087 956 777 236 .....  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Bumdes desa kawo dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Study percontohan batoko dan baliho Bumdes desa kawo kecamatan Pusut Kabupaten Lombok Tengah)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10-03-2020

Penulis



NIM. 21511A0061

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram :

Nama : PRISAI SAPUTRA AR

NIM : 21511A0061

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI PADA PERCETAKAN BATAKO DAN BALIHO BUMDes DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH”** adalah hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulis karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

**Mataram, 05 Februari 2020**

**Yang membuat pernyataan,**

**PRISAI SAPUTRA AR**  
**NIM. 21511A0061**

## RIWAYAT HIDUP



**PRISAI SAPUTRA AR** yang biasa dipanggil PRISAI, lahir di Desa kawo Kecamatan pujut Kabupaten Lombok tengah pada tanggal 01 Desember 1996. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Ayahanda H.M. ARAFAT dan Ibunda HAJJAH SAIMAH ,anak terakhir dari 3 bersaudara, .Penulis memula ipendidikan di SDN 2 Kawo pada tahun 2002 hinggatahun 2008, di tahun yang sama lalu melanjut kan pendidikan di SMPN 2 PRAYA dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penuli smelanjutkan pendidikan di SMAN 4 PRAYA dan tama tpada tahun 2015. Melalui penerimaan mahasiswa jalur tes pada tahun 2015 penulis berhasil lulus seleksi dan terdaftar sebaga imahasiswa jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

## MOTTO

*“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian,  
saya revisi dan saya menang”*

*“Hidup itu tidak seindah bayangan”*

*To: prisai*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati sujud syukur ku persembahkan pada Allah SWT yang maha kuasa dari segala-galanya, dengan rahmatNya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan Skripsi ini pada orang-orang yang ku sayangi :

Skripsi ini sya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta ayahanda H.M.Arafat dan ibundaku tercinta Hajjah Saimah Terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya, restu, dukungan dan perjuangan yang tidak akan dapat tergantikan oleh apapun.
2. Untuk kakak- kakak Ku beserta keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan dukungan motivasi sekaligus do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Sahabat-sahabat dan pacarku yang tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin saya sampai disini, terimakasih juga atas canda tawa, perjuangan suka duka yang telah kita lewati bersama yang telah mengukir selama ini.
4. Almamater hijauku tercinta ...

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua... aamiin, aamiinyaarabbalalamiin.....

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum WR...WB*

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi Di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”. Tak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa membimbing umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan Sebagai Dosen Penguji Saya.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. H Ibrahim H Abdullah MM selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S. AP., M. IP selaku dosen pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya H M Arafat dan Ibu saya Hajjah Saimah
7. Saudara-saudara saya kusnad, husnul, dan siti nurdianti
8. Teman-teman Prodi Administrasi Publik Angkatan 2016.

9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, saya menyadari bahwa ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT, tuhan semesta alam. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi saya dan pembaca sekalian.

**Wassalamualikum WR...WB...**

Mataram

Januari 2020

**PRISAI SAPUTRA AR**  
NIM. 21511A0061



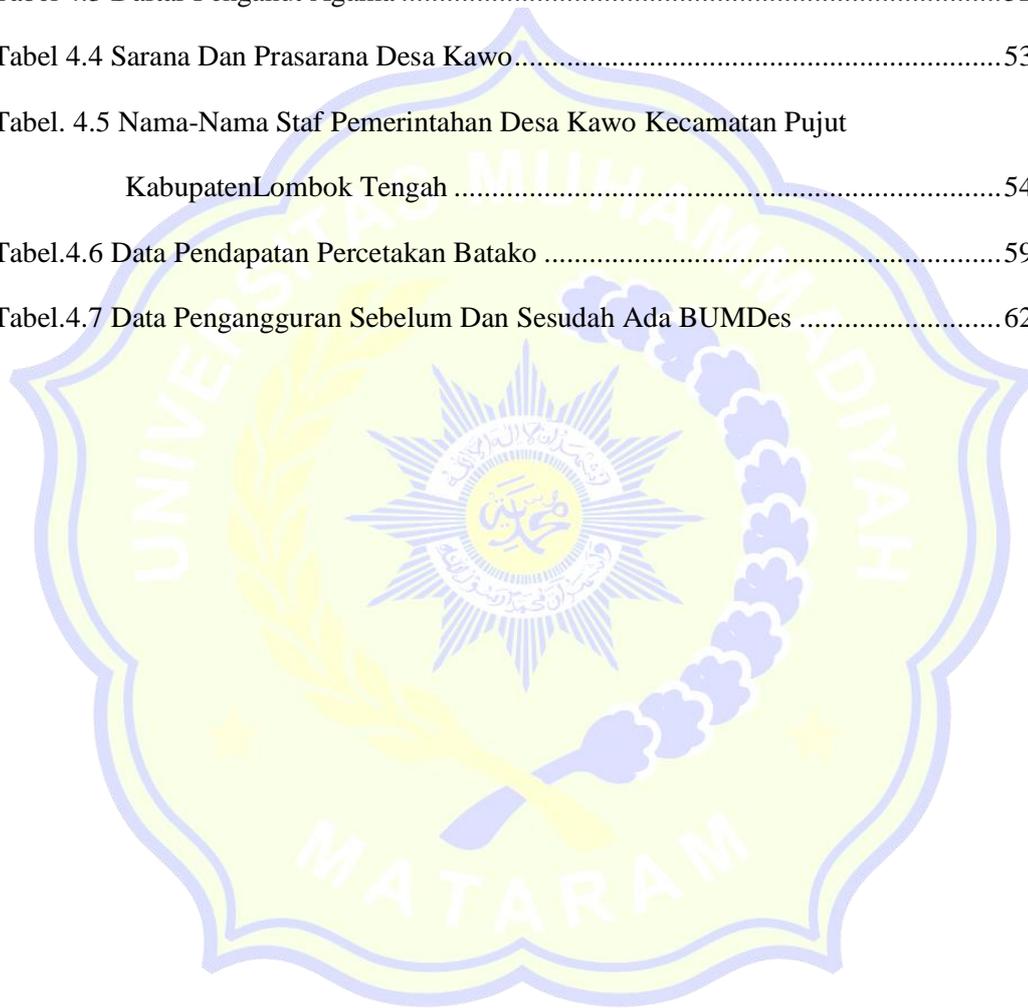
## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABBSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.2 Penelitian Terdahulu .....	12
2.3 Landasan Teori .....	15
2.3.1 Konsep Peran .....	15
2.3.2 Konsep Governance .....	19
2.3.3 Konsep pendapatan .....	21
2.3.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39

3.3 Teknik Pemilihan Narasumber .....	39
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	40
3.4.1 Jenis Data.....	40
3.4.2 Sumber Data .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5.1 Pengamatan (Observasi) .....	42
3.5.2 Wawancara (interview) .....	42
3.5.3 Metode Dokumentasi .....	43
3.5.4 Teknik Analisis Data.....	44
3.5.5 Redukasi Data .....	45
3.5.6 Peyajian Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	47
4.1.1 Letak Geografis .....	47
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	48
4.1.3 Struktur Organisasi.....	53
4.1.4 Profil BUMDes Desa Kawo Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah .....	55
4.1.5 Jenis Kegiatan Usaha.....	56
4.1.6 Struktur Kepengurusan Bumdes-Langgeng Sejagad .....	57
4.2 Pembahasan .....	58
4.2.1 Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Usaha Percetakan Batako Dan Baliho .....	58
4.2.2 Peran BUMDes dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan .....	61
4.2.3 Faktor Penghambat Dan Pendukung Peran Bumdes Desa Kawo Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kawo .....	49
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kawo .....	51
Tabel 4.3 Daftar Penganut Agama .....	52
Tabel 4.4 Sarana Dan Prasarana Desa Kawo.....	53
Tabel. 4.5 Nama-Nama Staf Pemerintahan Desa Kawo Kecamatan Pujut KabupatenLombok Tengah .....	54
Tabel.4.6 Data Pendapatan Percetakan Batako .....	59
Tabel.4.7 Data Pengangguran Sebelum Dan Sesudah Ada BUMDes .....	62



**PRISAI SAPUTRA AR, 21511A0061**

**PERAN BUMDes DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
MASYARAKAT (STUDI PADA PERCETAKAN BATAKO DAN BALIHO  
BUMDes DESA KAWO, KECAMATAN PUJUT,  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**ABSTRAK**

**PEMBIMBING I: Dr. H. Ibrahim Abdullah, M.M.**

**PEMBIMBING II: M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui studi pada percetakan batako dan baliho BUMDes Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah lima orang penduduk asli Desa Kawo, yang terdiri dari kepala desa, ketua BUMDes, kordinator satu dan bendahara umum BUMDes, dan anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan dua metode pengumpulan data yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi; pengumpulan data sekunder menggunakan kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan, dan situs internet. Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa teori yang dipakai, yaitu teori tentang peran BUMDes dan pendapatan pemerintah. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sudah maksimal namun masih banyak masyarakat yang belum tahu atau ingin berkontribusi untuk BUMDes itu sendiri. BUMDes melakukan berbagai cara agar usaha yang ada di Desa Kawo bisa berkembang. Salah satu caranya adalah BUMDes memberikan pinjaman atau modal dengan memberikan bunga yang sangat rendah.

Kata kunci: peran, BUMDes, dan kontribusi masyarakat.

**PRISAI SAPUTRA AR, 21511A0061**

**THE ROLE OF BUMDES IN INCREASING COMMUNITY INCOME: A STUDY  
ON BRICKS AND BILLBOARD PRINTING AT BUMDes OF KAWO VILLAGE,  
PUJUT DISTRICT, CENTRAL LOMBOK REGENCY**

**ABSTRACT**

SUPERVISOR I: Dr. H. Ibrahim Abdullah, M.M.

SUPERVISOR II: M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP.

The purpose of this study was to determine the role of BUMDes in increasing community income through bricks and billboard printing in Kawo Village, Pujut District, Central Lombok Regency. The informants in this study were five indigenous people of Kawo Village, consisting of the village head, BUMDes chairman, first coordinator and BUMDes general treasurer, and community members. This study used qualitative research methods, with two data collection methods, namely primary and secondary. Primary data collection used observation, interviews, and documentation; while secondary data collection used literature review through books, journals, theses, annual reports, and internet sites. In preparing this thesis the researcher used several theories, including theories about the role of BUMDes and government revenue. The results of this study illustrate that the role of BUMDes in increasing community income is maximal but there are still many people who do not know or want to contribute to BUMDes itself. The BUMDes employs various methods to develop businesses in the village, one of which is by providing loans or capital at very low interest rates.

**Keywords:** role, BUMDes, and community contribution.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan bagian sistem politik yang memberi peluang bagi warga negara untuk menyumbangkan daya kreativitas. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat kesulitan menghadapi perdagangan bebas yang mulai berlaku. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika Pemerintah Desa adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. *Sumber (Agung SW : 2016)*

Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui percetakan batako dan baliho (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan badan permusaratan desa (BPD).*(Sumber:Nofiratulah:2018)*

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Apa itu BUMDes? Istilah

BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. (Sumber: Wahyu Danares:2017)

Mengingat pentingnya badan usaha milik desa bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa dana desa yang di salurkan kepada BUMDes guna untuk mengembangkan ekonomi desa di Kawo Kecamatan pujut Kabupaten lombok tengah. Dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dan masarakat dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa. BUMDes ada karena adanya kegagalan pasar yang terjadi, maka dari itu pemerintah membentuk BUMDes sebagai bentuk pemerintah untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Kawo. (Sumber: Wahyu Danares:2017)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial

(*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. (Sumber: Wahyu Danares: 2017)

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem

1. Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 3 Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
2. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat

3. Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat 3 yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.
5. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah.
6. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes yang didirikan pada 2017 sebagai penguatan ekonomi Desa Kawo Sebagai salah satu desa di Kecamatan pujut Kabupaten Lombok tengah, Desa Kawo dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang percetakan baliho. Usaha yang dimiliki oleh Desa Kawo di antaranya bkmart, percetakan batako dan baliho. Salah satu Atas dasar tersebut, kemudian didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 2017.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Sebelum lahirnya kebijakan di atas, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih. *Sumber (Peraturan Menteri No 72/2005).*

Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDes, yaitu:

1. Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.

3. Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
4. Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan.
5. Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat. *Sumber Yunanto dkk (2014:3-4)*

Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Antara BUMDes dan ekonomi pribadi maupun kelompok masyarakat lainnya sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Semuanya saling melengkapi untuk menggairahkan ekonomi desa. Namun, BUMDes merupakan lembaga yang unik dan khas sepadan dengan keunikan desa.

Yunanto (2014:7) menjelaskan keunikan BUMDes sebagai berikut:

1. BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.

2. BUMDes lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap eksklusif karena hanya untuk anggota.

UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan. *Sumber : Yunanto dkk (2014:3-4)*

Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:

1. BUMDes tang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna desa.
2. BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis

sosial artinya bank desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan dan perempuan dari jeratan para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa.

3. BUMDes bertipe renting. BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan barang-barang (perangkat pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan lain sebagainya), baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memperoleh pendapatan desa.
4. BUMDes bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas. (Sumber: Aksa (2013).

Adapun konflik yang ada dilapangan kurangnya pengawasan dan transparansi pemerintah Desa Kawo oleh karena itu saya meneliti BUMDes dikarenakan memiliki pengaruh yang signifikan bagi pengembangan ekonomi desa. Maka dari itu, saya tertarik untuk memilih judul tentang *''PERAN BUMDes DESA KAWO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI PADA USAHA PERCETAKAN BATAKO DAN BALIHO BUMDES DI DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)''*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran BUMDESKawo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha percetakan batako dan baliho?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung peran BUMDES Kawo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran apa saja yang digunakan pemerintah Desa Kawo dalam meningkatkan pendapatan masarakat dan dapat mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi Desa Kawo.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan strategi pemerintah Desa Kawo dalam meningkatkan pendafatan masyarakat serta menanamkan kesadaran tentang pentingnya strategi pemerintah Desa Kawo dalam meningkatkan pendafatan masarakat studi kasus pada pecetakan batako dan baliho BUMDesDesa Kawo pada BUMDesDesa Kawo

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi pada masarakat agar pemerintah Desa Kawo dapat meningkatkan kesadaran masarakat dan pentingnya strategi pemerintah Desa Kawo dalam meningkatkan pendafatan masarakat studi pada percetakan batako dan baliho pada BUMDesDesa Kawo.



**BAB II**  
**TINJAUAN FUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan tahun	Judul penelitian	Jenis penelitian	Hasil penelitian
1	Wahyu Danares,2017	Strategi pengembangan badan usaha milik desa ponggok tirta mandiri desa pongok kabupaten klaten propensi jawa tengah	Kuantitatif	Terdapat bebrapa faktor penunjan berdirinya BUMDes tirta mandiri,diantaranya terdapat tiga titik yang menjadi aset desa, instruktur fisik yang mendukung, dukungan positif dari masarakat desa,kerjasama BUMDes dengan pt.bni46 (persero), tbk, manjemen yang berpendidikan dan profisonal.
2	Agung Septian Wijarnako, 2016	Peran bandan usaha milik desa	Kualitatif	1.pengurus dan anggota

**Tabel 2.1 Lanjutan**

		(BUMDes) dalam pemberdayaan masarakat di desa pandankrajan kecamatan kemlagi kabupaten mojokerto		BUMDestelah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya memperdayakan masarakat bisa tercapai. 2.upaya BUMDes untuk menambah modal dari simpan sukarela belum terpenuhi. Kurangny dukungan dari masarakaat yang mengumpulkan modal BUMDes untuk melakukan simpan sukarela.
3	Nofiratulah,2018	Eksitensi badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian masarakat desa soki kecamatan belo kabupaten	Kualitatif	Eksitensi badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian masarakat di desa soki kecamatan belo kabupaten

**Tabel 2.1 Lanjutan**

		bima		bima terus mengalami peningkatan segi pendapatan maupun dari segi pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4	Septiya Andri Astuti , 2017	Badan usaha milik desa (BUMDes) di era otonomi desa (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) mandiri bersatu pekon gisting bawah kecamatan gisting kabupaten tangganus)	Kualitatif	Bahwa tata kelola pada BUMDes mandiri bersatu pada era otonomi desa telah berjalan cukup baik. BUMDes mandiri bersatu telah menunjukkan keberadaannya dan memberikan manfaat kepada masyarakat pekon gisting bawah. Namun masih ditemukan beberapa kekurangan di lapangan terkait tata kelola BUMDes.

(Jurnal kusnadi 2016)

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Konsep Peran

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi dalam Soekanto, 2007:17) Peran diartikan sebagai perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Kozier Barbara dalam Soekanto (1999:110) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukan dalam suatu system. Menurut Soekanto (2012:213) bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsure statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

Peranan merupakan aspek dinamis apabila kedudukan seseorang atau organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga peranan tanpa kedudukan tidak akan bisa bergerak dan terlaksana. Menurut Hartono (1999;118) Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Sedangkan menurut soerjono soekanto (2002;243) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang dalam

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi yang penting bagi struktur social masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi peranan:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat. *Sumber (Soekanto 1995:269)*

Scott et al (1981) dalam Kanfer (1987: 197) Menyebutkan Lima aspek penting dari peran,yaitu :

1. Peran itu bersifat Impersonal:posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan
4. Peran itu dapat dipelajari dan diterapkan dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.

5. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan suatu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peranan. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan hubungan-hubungan yang berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social. Wirotomo (1981:99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada sesuatu individu yang menempati kedudukan social tertentu.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah menurut Keliat, (2011) antara lain :

1. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan Peran.
2. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
3. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang di emban.
4. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
5. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidak sesuaian perilaku peran.

6. Motivasi, insentif untuk selalu bekerja sama harus ada jika interaksi dan keterlibatan ingin diberlanjtkan
7. Kepemimpinan dan keberadaan struktur kepemimpinan dalam organisasi formal dan informal di masyarakat.
8. Kemampuan untuk melakukan *learning approach* adanya fleksibilitas untuk mencoba aktivitas dan metode baru serta memberi peluang mekanisme feedback untuk belajar dari kesuksesan dan kesalahan.
9. Sumber daya,kemampuan sumber daya di masyarakat.

Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas prilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton dalam Wirotomo(1936),Seseorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori peran menggambarkan Interaksi social dalam terminology actor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya.Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian,Sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang bernama "*life-course*" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai prilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

### 2.2.2 Konsep Governance (Pemerintah)

Pemerintah atau “Government” berarti Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah pemerintahan atau governance yaitu:

1. Tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004).
2. Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-2 tersebut (Kooiman, 1993).
3. Tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarah, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004).
4. Pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat (UNDP, 1997).

Pengertian secara Harfiah bahwa Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris berarti “*The Authoritative direction and*

*administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc*”. atau dalam bahasa Indonesia berarti “*Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota dan sebagainya*”. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut Governance yang berarti “*Act, fact, manner, of governing*”, jika diterjemahkan berarti tindakan, fakta, pola, dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Governance merupakan suatu proses atau kegiatan, oleh Kooiman (1993) berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Prof. Bintoro Tjokroamidjojo (34:2000) dalam Buku Paradigma Baru Management Pembangunan, mengemukakan bahwa *Governance* berarti; memerintah, menguasai, mengurus, mengelola. Kemudian kutipan pendapat Bondan Gunawan dengan istilah penyelenggaraan sebagai terjemahan dari Governance. Begitu juga dalam pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 2000 istilah Governance diterjemahkan menjadi pengelolaan.

Kesimpulan pengertian Governance disamping berarti pemerintahan, juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan *Pemerintahan*. Istilah Public Governance, Private Governance,

Corporate Governance, Banking Governance kemudian berkembang secara luas secara populer dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bisnis. Sedangkan didalam praktek terbaiknya disebut juga *Good Governance* (keperintahan yang baik) yang disampaikan dalam PP nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS.

### **2.2.3 Konsep pendapatan**

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung (Suroto:2000). Untuk memahami arti dari pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) dalam buku Standart Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah: Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan menurut Accounting Principle Board dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (1984:153) dalam buku Teori Akuntansi pengertian pendapatan adalah” Pendapatan sebagai inflow of asset kedalam

perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa”. Menurut pendapat lain, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas. (Antonio,2001: 204). Pendapatan merupakan suatu unsure yang harus dilakukan dalam melakukan suatu usaha karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha. Menurut Sumitro Joyohadikusumo (1957) Pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita dimana pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Samuelson dan Nordhaus:2013) Ada definisi lain mengenai pendapatan yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan

seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Menurut Sukirno (2002), pendapatan dapat dihitung melalui tiga cara yaitu:

1. Cara pengeluaran, cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran atau perbelanjaan ke atas barang – barang dan jasa.
2. Cara produksi, cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Cara pendapatan, dalam perhitungan ini pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segi pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Bagi seorang produsen pendapatan adalah kenaikan kotor dalam jumlah atau nilai aktiva dan modal, dan biasanya kenaikan tersebut berwujud aliran kas masuk ke unit usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat penciptaan melalui produksi dan penjualan output perusahaan (Kam:1998). Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus:2003).

Setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian ada dimiliki oleh seseorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada pengusaha dan sebagai balas jasanya mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja mendapat gaji dan upah, tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. Pendapatan yang diperoleh masing-masing jenis faktor produksi tersebut tergantung kepada harga dan jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan. Jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang adalah sama dengan harga dari barang tersebut (Sukirno:2002).

### **1. Jenis-Jenis Pendapatan**

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan (Suparmoko dalam Artaman:2015), yaitu:

1. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
2. Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

3. Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain dan pendapatan dari pensiun.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat suatu pendapatan diakui yaitu pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Ikatan Akuntan Indonesia (2002:23) memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang isinya sebagai berikut: "Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima, jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut, dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan".

## 2. Unsur-Unsur Pendapatan

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa
2. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain
3. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

Dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui beberapa aspek dimana dapat dijabarkan menjadi tiga sumber pendapatan yaitu :

1. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.
2. Pendapatan non operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal.
3. Pendapatan luar biasa (extra ordinary), yaitu pendapatan yang tak terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

(Baridwan, 2011:28-35)

Menurut Kusnadi (2000;19) menyatakan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

2. Pendapatan operasional untuk setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun sasaran utama dari usaha pokok perusahaan

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Penjualan kotor yaitu merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada langganan atau yang membutuhkannya.

2. Penjualan bersih yaitu merupakan hasil penjualan yang sudah diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli. Jenis pendapatan operasional timbul dari berbagai cara, yaitu :
  - a. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut.
  - b. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi.
  - c. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor.
  - d. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.

Adapun jenis dari pendapatan ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya, pendapatan bunga, sewa, royalti dan lain-lain.
2. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud.
3. Pendapatan bunga, sewa, royalti, keuntungan (laba), penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan dividen merupakan

pendapatan diluar usaha bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Dan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan ekuitas dari transaksi-transaksi yang bukan kegiatan utama dari entitas dan dari transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lainnya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi entitas selain yang dihasilkan dari investasi pemilik disebut dengan keuntungan.

#### **2.2.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pada pasal 1 ayat 6 UU nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan

kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam

rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

### **1. Unsur-Unsur BUMDes**

Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDesa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDesa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa

2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di

pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan
- d. perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

## **2. Pengelolaan BUMDes**

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan beberapa prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dapat dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. BUMDes sebagai badan usahayang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan

pemerataan kesempatan berusaha, dan dapat juga mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dapat berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi sebagian kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat
4. Masyarakat desa yang dalam hal kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan mereka kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.

2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkeadilan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat didalam hubungan BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan serta kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial Partisipatif (komersial dan institution) Sehingga membutuhkan kerja sama yang sinergis antara hubungan pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait dengan BUMDes.

## 2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

## 3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang individu dari seseorang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun.

## 4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan dapat terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMS sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah sifat kejujuran adil dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang kredibel signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa

## 5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri serta mampu dan bertanggungjawab.

## 6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktifitas terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang berlandaskan filsafat post positivism yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana penelitian berperan sebagai instrument kunci. (Sugiyono,2008:15).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kawo kecamatan pujut kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara, Indonesia. Jumlah penduduk Desa Kawo 8.255 Jiwa dan luas Desa Kawo 4,7 km<sup>2</sup>. Penelitian ini memilih lokasi karena tertarik meneliti BUMDesDesa Kawo dalam peran pemerintah Desa Kawo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **3.3 Teknik Pemilihan Narasumber**

Dalam penelitian beberapa pihak dijadikan sebagai informan terutama orang-orang yang dianggap mempunyai informasi kunci yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan Teknik “*purposive sampling*” yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2009:85). Menurut penulis informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa KawoKecamatan Pujut
2. Kasi Pemerintahan
3. Kepala BUMDes
4. Koordinator
5. Masyarakat

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Kualitatif

Menurut Meleong (2005;6) data kualitatif adalah jenis data yang berhubungan dengan nilai misalnya adanya pernyataan sebagai suatu keutuhan pada konteks keutuhan tersebut.

2. Data kuantitatif

3. Arikunto (2002:93) mengatakan bahwa data yang bersifat kuantitatif adalah data yang berwujud berdasarkan kerangka hasil perhitungan.

4. Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukur yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

### 3.4.2 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Bagong suyanto dan sutinah (2005:55) mengatakan data primer adalah data yang dihimpun oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi social dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek atau (informen) melalui proses wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Bagong suyanto dan sutinah (2005:56) mengatakan data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder dikenal sebagai data pendukung yang dapat digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data sekunder melalui surat kabar, majalah, media, jurnal dan lain-lain sebagian yang mendukung hasil penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus "Divalidasi" seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan.

### 3.5.1 Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan Responden kecil dalam mendapatkan hasil (Riduwan, 2010:57). Nasution (dalam sugiyono, 2013). Menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (Proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

### 3.5.2 Wawancara (*Interview*)

wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dengan lawan bicara. Cakupan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Bagong suyanto dan sutinah. 2005:69). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam (sugiyono, 2013:231). Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh

sugiyono (2013) Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah jenis wawancara semiterstruktur. Jenis ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview. Berikut beberapa ciri dari wawancara semiterstruktur :

1. Pertanyaan lebih terbuka, akan tetapi ada batasan tema dan alur pembicaraan
2. Kecepatan wawancara dapat diprediksi
3. Bersifat lebih fleksibel, tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban)
4. Ada pedoman wawancara yang akan menjadi patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata.

Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Wawancara semiterstruktur disesuaikan dengan kondisi informan dan lokasi wawancara. Dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, serta macam ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang ditemukan oleh informan (sugiyono, 2013:234).

### **3.5.3 Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi Arikunto (2002:158) yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Sedangkan

pendapat lain menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Husaini Dkk,2009:69).

Beberapa penjelasan diatas maka dalam penelitian ini akan digunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Kawo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **3.5.4 Teknik Analisis Data**

Dikarenakan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif maka teknik analisis data, maka data yang akan diperoleh yaitu data kualitatif, yang dimaksud untuk memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang mencakup dalam permasalahan yang dilakukan dilokasi penelitian pada saat pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah melakukan analisis belum memuaskan. Kemudian peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali,sampai saat tertentu diperoleh data yang di anggap.

(sugiyono,2013:246). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersama dengan pengumpulan data.

### **3.5.5 Reduksi Data (Data Reduction)**

Reduksi data, yaitu kegiatan memilih data dan penyederhanaannya dari data kasarnya dan memberikan kode pada data dianalisis dimana semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data, sejalan dengan pendapat Arikunto (2008:174).Mengatakan reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengAbstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dimana semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak,dan konpleks dan rumit.

Oleh karena itu kita perlu mereduksi data untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok,memfokuskan dalam hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memeberikan gambaran yang lebih jelas, dalam mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

### **3.5.6 Penyajian Data**

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data.Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk data-data atau kalimat yang dapat dimengerti.Dalam penelitian ini dapat memilih data

yang biasa menjawab masalah yang diteliti. Dengan penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang menjadi titik masalah Arikunto (2008:176).

